

LAPORAN

AMNESTY

INTERNATIONAL

2020/21



AMNESTY
INTERNATIONAL



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
ANALISIS GLOBAL	8
PERLINDUNGAN HIDUP, KESEHATAN, DAN SOSIAL	8
KEKERASAN BERBASIS GENDER	10
REPRESI TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT	11
RINGKASAN KAWASAN ASIA – PASIFIK	13
KEBEBASAN BEREKSPRESI	14
PEMBELA HAK ASASI MANUSIA	15
HAK ATAS KESEHATAN	16
DISKRIMINASI – SERANGAN TERHADAP ETNIS DAN AGAMA MINORITAS	17
PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN	18
KEGAGALAN DALAM MENCEGAH PERUBAHAN IKLIM	20
INDONESIA	21
LATAR BELAKANG	21
HAK ATAS KESEHATAN	21
HAK ATAS INFORMASI	21
HAK-HAK PEKERJA	22
KEBEBASAN BEREKSPRESI	22
KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT	23
PEMBELA HAK ASASI MANUSIA	23
PELANGGARAN HAM DI PAPUA DAN PAPUA BARAT	24
HAK-HAK PEREMPUAN	24
HAK PARA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN INTERSEKS (LGBTI)	25

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2020, sekelompok molekul kecil mengguncang dunia.

Dengan ukuran yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, virus yang awalnya bersifat lokal tiba-tiba menyebar sangat cepat dan menjadi pandemi global. Apa pun asal-usul pastinya, virus corona (COVID-19) dan para penderitanya bertambah pesat dan tersebar sebagai akibat dari ketidaksetaraan global yang luas dan mendalam baik dalam satu negara maupun antarnegara. Hal ini diperparah oleh kebijakan penghematan yang melemahkan infrastruktur publik dan sistem kesehatan masyarakat; juga oleh melemahnya bentuk, fungsi, dan kepemimpinan organisasi Internasional. Kondisi ini diperburuk oleh tekanan para pemimpin negara yang mempertahankan pemahaman usang terkait kedaulatan negara, serta menolak pendekatan berbasis norma universal, bukti, dan ilmu pengetahuan.

Ini merupakan situasi yang luar biasa. Tetapi apakah kita sudah bangkit untuk menghadapi tantangan tersebut?

Situasi luar biasa menuntut tanggapan yang luar biasa serta membutuhkan kepemimpinan yang luar biasa pula.

Pada tahun 2020, kepemimpinan yang luar biasa bukan lagi muncul dari mereka yang punya kekuasaan, privilese, atau kekayaan, tetapi muncul dari perawat, dokter, dan petugas kesehatan yang merupakan penyelamat di garda terdepan.

Kepemimpinan tersebut muncul dari orang-orang yang merawat lansia. Muncul dari teknisi dan ilmuwan yang melakukan jutaan tes dan percobaan serta bergegas menemukan vaksin. Muncul dari mereka yang, kebanyakan berpendapatan rendah, bekerja untuk menghidupi kita semua; yang membersihkan jalan; mengurus ratusan ribu jenazah; memulihkan layanan penting; patroli di jalanan; mengoperasikan angkutan umum yang masih tersisa.

Pada tahun 2020, ketika sebagian besar dunia berhenti, merekalah yang bangkit dan berperan. Begitu pula, mereka yang tetap bertahan di rumah karena solidaritas, jika mereka punya rumah, yang tetap menjaga jarak fisik meskipun menguras emosi, dan yang merawat orang-orang di sekitar mereka.

Tetapi di balik tindakan kepahlawanan itu, masa pandemi membawa konsekuensi merugikan berupa penyalahgunaan kekuasaan, baik secara struktural maupun historis. Pandemi COVID-19 mungkin tidak mendefinisikan jati diri kita, tetapi pandemi jelas memunculkan jati diri yang seharusnya tidak kita miliki.

Sekali lagi orang-orang bangkit. Mereka bangkit melawan ketidaksetaraan, mereka berdiri melawan kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam, terhadap masyarakat minoritas, tidak mampu, dan tunawisma. Mereka bangkit melawan pengucilan, patriarki, dan retorika kebencian serta tindakan kejam akibat dari kepemimpinan supremasi.

Tuntutan *Black Lives Matter* dan gerakan *#MeToo* menggema di seluruh dunia. Protes terhadap penindasan dan ketidaksetaraan memenuhi jalanan dari Belarusia sampai Polandia, Irak sampai Chile, Hong Kong sampai Nigeria. Seringkali, dengan

risiko keselamatan ditanggung sendiri, kepemimpinan muncul dari pembela HAM dan aktivis keadilan sosial yang mendorong kita semua.

Terkadang kita bisa melihat sekilas kepemimpinan politik yang luar biasa, tidak jarang muncul dari pemimpin wanita, yang mengambil keputusan berani dan sulit untuk melindungi masyarakat, memperbaiki sistem kesehatan, melakukan investasi yang diperlukan agar solusi dapat segera ditemukan secepat mungkin, dan mengeluarkan bantuan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.

Tetapi pandemi juga menguatkan sifat pasif dan pembohong, egois dan penipu, di kalangan pemimpin politik dunia.

Saat kami menulis laporan ini, negara-negara terkaya hampir memonopoli pasokan vaksin dunia, yang mengakibatkan negara-negara dengan sumber daya paling sedikit mengalami kondisi kesehatan dan HAM yang terburuk, dan dengan demikian akan mengalami gangguan ekonomi dan sosial lebih lama.

Saat satu juta orang meninggal, dan jutaan lainnya kehilangan mata pencaharian, apa yang bisa kita lakukan saat fakta menunjukkan bahwa pendapatan para miliarder melonjak, raksasa teknologi mendapatkan keuntungan berlipat, dan pasar saham di seluruh pusat keuangan dunia tumbuh? Yang terpenting, apa yang bisa mereka tawarkan untuk mengurangi beban pandemi; untuk memastikan pemulihan yang adil dan layak? Pada awal tahun 2021, mereka masih diam atas persoalan tersebut.

Bagaimana mungkin, di saat pandemi, proporsi ekonomi global menunjukkan bahwa mereka yang punya kekayaan paling sedikit justru memberi paling banyak?

Tahun 2020 juga mengungkapkan kelemahan kerja sama internasional: sistem multilateral yang runtuh akibat tunduk kepada yang paling kuat dan memberi seadanya kepada yang paling lemah; sebuah sistem yang tidak mampu meningkatkan solidaritas global. Sikap Tiongkok yang tidak bertanggung jawab di masa awal pandemi dengan menahan informasi penting benar-benar menimbulkan bencana, sementara keputusan AS di tengah pandemi untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan pengabaian yang mengerikan terhadap seluruh dunia.

Tindakan setengah-setengah – seperti keputusan G20 untuk menanggukkan pembayaran utang bagi 77 negara pada tahun 2020 tetapi masih menuntut agar uang tersebut nanti dibayar kembali dengan bunga – mengancam timbulnya kesenjangan struktural dan kesulitan ekonomi dalam pemulihan pandemi, yang berdampak serius terhadap hak sosial dan ekonomi jutaan rakyat.

Setelah kegagalan selama bertahun-tahun, tahun 2020 sekali lagi membuktikan bahwa lembaga politik global kita tidak mampu untuk memenuhi tujuan global yang seharusnya mereka capai.

Pandemi semakin menunjukkan ketidakmampuan dunia untuk bekerja sama secara efektif dan adil di awal peristiwa global dengan probabilitas rendah dan berdampak tinggi. Oleh karena itu, kita hampir tidak dapat terhindar dari rasa bahaya yang akan

datang karena, saat melihat ke depan, kita merenungkan krisis yang lebih besar yang tidak dapat dipulihkan dengan vaksin – yaitu krisis iklim.

Pada tahun 2020, jutaan orang terkena bencana iklim ekstrem. Bencana, yang diperburuk oleh pemanasan global dan ketidakstabilan iklim dan sangat berdampak bagi jutaan orang untuk menikmati hak hidup, pangan, kesehatan, papan, air, dan sanitasi, antara lain: dari kemarau berkepanjangan di sub-Sahara Afrika dan India hingga badai tropis yang melanda Asia Tenggara, Karibia, Afrika Selatan dan Pasifik, hingga bencana kebakaran yang melanda California dan Australia. Dan tanggapannya? Komitmen negara-negara maju, menurut Perjanjian Paris, untuk memastikan setidaknya US\$100 miliar digunakan sebagai pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang pada tahun 2020 sama sekali tidak terpenuhi. Negara-negara tersebut terbukti gagal mengedepankan komitmen yang diperlukan untuk memenuhi target tahun 2030 guna mengurangi setengah emisi gas rumah kaca global. Perubahan drastis tentunya diperlukan untuk mencegah kenaikan suhu global yang lebih dari 1,5 C melebihi tingkat pra-industri yang akan memicu konsekuensi yang tidak dapat diubah.

2020: 366 hari yang menjadi saksi suburnya keegoisan, sikap pengecut, pasif, dan kegagalan fatal dari xenofobia dan kebencian rasial. 366 hari yang menggambarkan betapa kuat dan mengakarnya warisan kekerasan rasisme, patriarki, dan ketidaksetaraan selama berabad-abad. Tapi 366 hari itu juga menjadi sumber banyak inspirasi bagi kita untuk tetap kuat dan bertahan sebagai sesama umat manusia; hari-hari yang menunjukkan tekad orang-orang untuk membela hak-hak mereka dan untuk bisa pulih dari pandemi dengan baik.

Kejadian luar biasa menuntut tanggapan yang luar biasa serta membutuhkan kepemimpinan yang luar biasa pula. Jadi apa yang diperlukan untuk menciptakan dunia yang jauh lebih tangguh untuk menghadapi tantangan besar di masa depan?

Fondasi untuk masyarakat global pascapandemi yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada pemulihan. Ini membutuhkan sikap tanggung jawab, HAM, dan pemikiran ulang dan reformulasi hubungan kita dengan habitat, lingkungan dan ekonomi kita.

Pihak berwenang harus segera bekerja untuk mempercepat produksi dan pengiriman vaksin bagi semua. Ini adalah ujian paling mendasar, bahkan sangat esensial, bagi kemampuan dunia untuk bekerja sama: untuk berpikir secara global, bertindak secara lokal, dan membuat rencana jangka panjang. Ini termasuk mendukung dilaksanakannya perjanjian TRIPS Organisasi Perdagangan Dunia yang akan memungkinkan perluasan produksi produk kesehatan COVID-19 yang sangat dibutuhkan dan memastikan perusahaan farmasi membagikan inovasi dan teknologi mereka melalui lisensi dan inisiatif terbuka dan non-eksklusif seperti COVID-19 *Technology Access Pool* (C-TAP) dari WHO.

Selain langkah pertama tersebut, pemulihan yang “membangun kembali menjadi lebih baik” akan menuntut lebih dari sekadar pembangunan ulang. Ini membutuhkan pengaturan ulang yang mengatasi akar penyebab krisis dengan melindungi dan menghormati hak, secara keseluruhan dan universal.

Pertama, menghentikan agenda pemerintah untuk meningkatkan “keamanan” yang, sejak peristiwa 9/11, telah mendorong merebaknya penindasan terhadap ruang sipil yang bahkan semakin meluas selama pandemi. Agenda tersebut memberikan rasa normalitas palsu kepada kekuasaan eksekutif dan kepolisian luar biasa dan yang kini berpotensi menjadi permanen. Agenda tersebut harus dibongkar.

Kedua, pemulihan yang adil dan berkelanjutan menuntut pengaturan ulang sistem perpajakan publik di seluruh dunia. Perpajakan yang memadai adalah suatu keharusan guna memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi hak ekonomi dan sosial termasuk hak kita atas kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Perpajakan yang adil dan sesuai dengan HAM terkait keuntungan transnasional akan berperan penting, begitu juga dengan upaya bersama untuk mengakhiri penggelapan pajak dan penghindaran pajak yang agresif. Negara semestinya memberlakukan pajak bahan bakar fosil baru pada keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan energi dan pembayaran kepada pemegang saham yang berasal dari bisnis bahan bakar fosil perusahaan tersebut, guna mendorong pemegang saham dan perusahaan untuk beralih ke energi terbarukan, dan tanpa membebani konsumen.

Pengambilan keputusan yang dangkal tidak lagi relevan pascapandemi. Selama investasi untuk aset berkecenderungan karbon tinggi tidak diatur dalam regulasi, bersifat spekulatif, dan sangat diperebutkan mendominasi ekonomi global, krisis iklim hanya akan semakin parah, seiring krisis kemudian juga akan muncul berbagai pelanggaran dan mempercepat kita mencapai kemandang yang tidak dapat diubah yang membahayakan keberadaan umat manusia.

Ketiga, kita harus menghadapi kenyataan bahwa negara kebangsaan berdaulat yang bertindak sendiri-sendiri, tidak memiliki perlengkapan yang lebih baik untuk mengatasi tantangan global ini, perbandingannya seperti menggunakan rem tangan sepeda untuk menghentikan pesawat.

Mereformasi tata kelola global dan menata kembali tujuan lembaga-lembaga global untuk memperkuat dan mengupayakan tercapainya HAM merupakan prasyarat untuk pemulihan yang kuat. Kita tidak dapat melakukan pendekatan “pilih-pilih” yang diadopsi oleh beberapa negara, yang hanya mengambil “ceri” terpilih dari “kue” tata kelola global seraya meninggalkan unsur-unsur HAM, tanggung jawab, dan transparansi yang dianggap “tidak sesuai”.

Tata kelola global yang tepat guna membutuhkan pengawasan global terkait bagaimana norma dan standar internasional HAM diterapkan untuk pencegahan genosida dan kejahatan kemanusiaan; penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi; sensor brutal dan penindasan perbedaan pendapat; dan diskriminasi, kekerasan dan penyiksaan oleh pihak yang sebenarnya bertugas melindungi kita.

Inovasi, kreativitas, dan daya cipta yang diperlukan guna menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan menuntut supaya kebebasan kita ditegakkan, dipertahankan, dan dilindungi, bukan dibatasi. Tata kelola global tidak akan memenuhi tujuan global sampai dan kecuali, keterlibatan yang sistematis pada penilaian dan penghormatan terhadap masyarakat sipil global dijunjung tinggi dalam setiap operasinya. Kita harus

menuntut itu. Kita harus mengklaim itu. Kita harus mengaturnya. Dan sebagai masyarakat sipil, kita harus memastikan bahwa kita juga siap dengan kondisi itu.

Tahun 2020, sekali lagi, memberi kita pelajaran untuk generasi yang akan datang: saling ketergantungan antara umat manusia; universalitas dari apa yang “kita, rakyat” menuntut dari sistem tata kelola di saat krisis, dan betapa tak terpisahkannya masa depan kita dari masa depan yang kita ciptakan untuk bumi. Ini memberi kita pelajaran tentang esensi dari HAM.

Pertanyaan yang masih harus dijawab adalah: apakah kita cukup berani untuk mengamati apa yang harus dilakukan dan cukup berani untuk melanjutkan dan melakukannya, dengan skala dan progress yang memadai?

Agnès Callamard

Sekretaris Jenderal

ANALISIS GLOBAL

Pada tahun 2020, dunia diguncang oleh COVID-19. Jutaan nyawa terdampak parah oleh pandemic serta berbagai langkah yang dilakukan untuk mengatasinya. Kasus-kasus yang terjadi juga mengungkap, bahkan memperburuk, pola-pola perlakuan kejam dan ketidaksetaraan. Sebagian perlakuan kejam tersebut berakar dari diskriminasi ras, gender, dan hal-hal lainnya, yang sering kali bersinggungan dan membuat masyarakat tertentu menjadi rentan. Perlakuan kejam dan ketidaksetaraan tersebut menjadi sorotan dan ditentang keras oleh gerakan massa seperti *Black Lives Matter* dan kampanye hak-hak perempuan, yang menghasilkan beberapa kemenangan melalui kerja keras. Pandemi memperjelas dampak HAM terkait krisis politik dan keuangan yang terjadi selama bertahun-tahun, serta cela pada sistem tata kelola dan kerja sama di tingkat global, yang diperburuk oleh beberapa negara yang mengabaikan tanggung jawab mereka atau menyerang lembaga multilateral. Dinamika ini digambarkan dalam tiga area: hak untuk hidup serta hak atas kesehatan dan perlindungan; kekerasan berbasis gender dan ancaman terhadap hak-hak seksual dan reproduksi; serta represi terhadap perbedaan pendapat.

Sementara itu, baik dalam konflik lama yang masih berlangsung maupun konflik baru, pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata melakukan serangan membabi buta yang menargetkan warga sipil, membunuh ribuan orang, dan menyebabkan atau memperpanjang pengungsian massal serta krisis kemanusiaan. Meski ada beberapa dakwaan atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, impunitas dalam masa perang dan damai tetap menjadi norma dan, di beberapa negara, supremasi hukum terkikis. Jutaan orang menderita karena bencana yang diperparah oleh krisis iklim.

Gambaran dunia secara umum sedang kacau. Namun, dengan melakukan langkah-langkah mendasar untuk mengatasi pandemi dan berbagai krisis HAM lainnya, para pemimpin memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali kerja sama internasional dan membangun masa depan yang lebih berkeadilan.

PERLINDUNGAN HIDUP, KESEHATAN, DAN SOSIAL

COVID-19 telah membunuh setidaknya 1,8 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2020. Sistem kesehatan dan program perlindungan sosial, yang dalam beberapa dekade ini makin melemah karena kurangnya investasi dan kesiapan, kurang mampu untuk merespons. Pendapatan pekerja terdampak karena naiknya angka pengangguran dan ketidakaktifan, sementara jumlah orang yang menghadapi kerawanan pangan akut bertambah dua kali lipat menjadi 270 juta orang.

Pemerintah gagal dalam melindungi tenaga kesehatan dan pekerja esensial lainnya secara layak. Ribuan nyawa hilang karena COVID-19 dan banyak yang menderita sakit parah karena kurangnya alat pelindung diri (APD). Amnesty International mencatat dugaan-dugaan adanya otoritas pemerintah yang melecehkan dan mengintimidasi tenaga kesehatan atau pekerja esensial lainnya terkait pandemi di 42 dari 149 negara yang dipantau; beberapa mendapatkan tindakan balasan, termasuk penangkapan dan pemecatan, karena mengutarakan kekhawatiran terhadap keselamatan atau kondisi kerja. Tenaga kesehatan perempuan secara khusus sangat terdampak karena mereka mencakup 70% dari tenaga kerja di sektor kesehatan dan sosial di seluruh dunia, yang telah mengalami kesenjangan pendapatan antar gender yang signifikan.

Beberapa Langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi COVID-19 memiliki dampak diskriminatif terhadap kelompok marginal.

Karantina wilayah dan jam malam mengakibatkan banyaknya pekerja di sektor informal kehilangan pendapatan tanpa jaminan perlindungan sosial yang layak. Sebagai kelompok yang mendominasi sektor tersebut, perempuan dan anak-anak perempuan terdampak secara tidak proporsional. Langkah lainnya, yaitu pengenalan pembelajaran secara daring tanpa menjamin akses ke

teknologi yang memadai, sangat merugikan banyak pelajar dari kelompok marginal. Perempuan merupakan pihak yang paling terbebani dengan pembelajaran dari rumah ini, juga perawatan tak berbayar lainnya karena tutupnya layanan publik, termasuk merawat kerabat yang sakit.

Selain itu, COVID-19 memperburuk situasi pengungsi dan migran yang sudah genting, dengan banyak di antara mereka terperangkap di kamp-kamp kotor atau rumah detensi dan sebagian lainnya terdampar karena penutupan perbatasan. Di 42 dari 149 negara yang dipantau oleh Amnesty International, terdapat beberapa laporan bahwa pengungsi dan migran menjadi korban *refoulement* (pengembalian paksa). Sementara pemerintah di berbagai negara mengambil langkah untuk membebaskan tahanan guna menghambat penyebaran COVID-19, kondisi di berbagai fasilitas penahanan yang padat dan tidak higienis membahayakan para tahanan. Pengusiran paksa yang terus terjadi (Amnesty International mencatat berbagai dugaan kasus ini di 42 dari 149 negara yang dipantau) meningkatkan paparan mereka terhadap virus karena tidak memiliki tempat tinggal.

Di banyak negara, kelompok minoritas etnik dan masyarakat adat menghadapi, memiliki tingkat penularan dan kematian yang tinggi, yang disebabkan ketidaksetaraan dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan. Tokoh politik dan agama menstigmatisasi terhadap kelompok marginal ini, menyalahkan mereka karena menyebarkan virus. Masyarakat Muslim di beberapa negara di Asia Selatan dan kaum

LGBTI di beberapa negara di Afrika dan Eropa juga menjadi target dalam kasus ini.

Saat COVID-19 diumumkan sebagai pandemi, negara-negara secara konsisten mengacu kepada kebutuhan mendesak untuk menghambat, memitigasi, dan mengalahkan pandemi sekaligus menghargai HAM. Fasilitas COVAX milik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menunjukkan inisiatif global yang positif yang bertujuan untuk menjamin akses vaksin ke lebih banyak negara, namun hal ini justru dirusak oleh Rusia dan AS yang tidak berpartisipasi, penimbunan vaksin oleh negara-negara kaya, dan keengganan perusahaan untuk berbagi kekayaan intelektual. Lebih dari 90 negara menerapkan pembatasan ekspor yang berdampak terhadap berbagai barang termasuk peralatan medis, APD, produk farmasi, dan makanan.

Negara-negara kaya juga memblokir Langkah untuk mengadopsi proposal di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait penangguhan sementara hak kekayaan intelektual untuk produk COVID-19 yang bertujuan untuk mempermudah akses universal. Perbedaan pendapat antara AS dan Tiongkok di Dewan Keamanan PBB terkait rujukan terhadap WHO menunda pengesahan resolusi gencatan senjata global guna mendukung respons terhadap COVID-19 selama tiga bulan. Meski G20 menyetujui penangguhan terbatas pembayaran utang dari negara-negara miskin, mereka sendiri gagal memenuhi tujuan yang telah mereka janjikan terkait respons skala besar yang terkoordinasi.

Untuk menegaskan kembali kerja sama dan memenuhi kewajiban HAM, semua pemerintah harus menjamin ketersediaan dan akses vaksin COVID-19 bagi semua orang dan membebaskan biaya pemeriksaan di tempat perawatan. Mereka juga harus mendukung pengembangan dana perlindungan sosial global yang berdasarkan pada standar HAM. Negara-negara kaya dan lembaga-lembaga keuangan internasional harus menjamin bahwa semua

negara memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk merespons dan bangkit Kembali dari pandemi, termasuk melalui penanggulangan dan pembatalan utang.

KEKERASAN BERBASIS GENDER

Peraturan perundang-undangan yang baru untuk melawan kekerasan terhadap wanita dan anak perempuan telah disahkan di Kuwait, Korea Selatan, dan Sudan. Beberapa negara, termasuk Kroasia, Denmark, Belanda, dan Spanyol, telah mengambil langkah untuk menyempurnakan undang-undang pemerkosaan agar memasukkan unsur persetujuan (*consent*). Beberapa negara di Afrika memperlihatkan kemajuan dalam aspek hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya yang bertujuan mengakhiri impunitas atas kasus-kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya dalam masa damai dan konflik. Uni Afrika tampak siap untuk menyusun perjanjian regional baru untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Akan tetapi, implementasi Konvensi Istanbul, yang setara dengan Majelis Eropa, mengalami gangguan di tiga negara anggota.

Dalam praktiknya, kekerasan berbasis gender, termasuk pembunuhan “demi kehormatan” dan berbasis kasta, serta kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual, masih banyak terjadi di seluruh dunia dan pihak berwenang pada umumnya gagal untuk mengambil langkah pencegahan yang cukup, mengadili pelaku, dan memberikan pemulihan kepada penyintas. Beberapa pihak berwenang sendiri justru melakukan kekerasan dengan, misalnya, menghukum perempuan atas dugaan pelanggaran hukum Islam atau mengharuskan laki-laki untuk melakukan pengujian anal yang setara dengan penyiksaan.

Diskriminasi yang sudah berlangsung lama dalam hukum dan praktik ini mendukung kekerasan dan yang dimanifestasikan dalam banyak cara. Amnesty International mencatat berbagai dugaan yang menyebutkan orang-orang

LGBTI ditangkap atau dimasukkan ke rumah detensi pada tahun 2020 karena orientasi seksual atau identitas gender mereka di 24 dari 149 negara yang dipantau.

Situasi ini diperparah dengan langkah-langkah yang diambil untuk mengendalikan COVID-19. Organisasi pendukung di seluruh dunia melaporkan adanya peningkatan nyata dalam kekerasan berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga; banyak perempuan dan orang-orang LGBTI terkurung bersama pelaku kekerasan selama karantina wilayah berlangsung. Beberapa pemerintah mengambil langkah darurat untuk membantu penyintas. Namun, banyak juga yang mengganggu dukungan untuk mereka, termasuk layanan kesehatan seksual dan reproduksi serta konseling, sebagai layanan nonesensial, sehingga akses untuk layanan terhenti selama karantina wilayah.

Beberapa yurisdiksi juga menganggap penanganan aborsi sebagai layanan non-esensial, yang lalu berdampak terhadap kelompok marginal secara tidak proporsional. Sebaliknya, yurisdiksi lainnya menerapkan kebijakan progresif seperti mengizinkan akses pil aborsi melalui telemedis untuk mengurangi risiko terinfeksi. Dalam perkembangan positif di luar konteks pandemi, dekriminialisasi aborsi telah dilakukan di Argentina, Irlandia Utara, dan Korea Selatan. Meski demikian, aborsi masih menjadi tindakan kriminal di sebagian besar negara di satu negara Uni Eropa lebih lanjut melarang akses untuk aborsi.

Pada tingkat internasional, negara-negara PBB menandai hari jadi ke-25 Deklarasi dan Platform Aksi Beijing dengan mengesahkan deklarasi politik menggembirakan guna menegaskan kembali komitmen memajukan hak asasi perempuan dan menghapus “semua bentuk kekerasan dan praktik berbahaya terhadap semua perempuan dan anak perempuan”. Namun, mereka tidak menyertakan referensi eksplisit mengenai kesehatan serta hak-hak seksual dan reproduksi. Sementara itu,

pemerintah di beberapa negara berupaya memungkiri konsensus yang ada seputar hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dengan terus berusaha menghapus “hak seksual dan reproduksi” dari komitmen internasional yang sudah lama terbentuk.

Pemerintah harus mengambil langkah darurat bersama untuk menghentikan reaksi buruk terhadap hak-hak perempuan dan orang-orang LGBTI serta mengambil langkah nyata untuk mewujudkan keadilan gender. Mereka juga harus mewujudkan inisiatif global seperti Deklarasi dan Platform Aksi Beijing serta agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan ke dalam langkah konkret untuk menghapus kekerasan berbasis gender, mengatasi permasalahan yang ada, termasuk diskriminasi, serta menjamin kesehatan dan hak-hak seksual dan reproduksi untuk semua.

REPRESI TERHADAP PERBEDAAN PENDAPAT

Pemerintah di banyak negara merepresi perbedaan pendapat dan membatasi ruang sipil. Sebagai respons terhadap protes yang menentang pemimpin yang tidak bertanggung jawab, terkikisnya hak-hak sosial dan ekonomi serta rasisme struktural (seperti protes yang dipimpin oleh gerakan *Black Lives Matter*), pasukan keamanan menyalahgunakan senjata api dan senjata tidak mematikan termasuk gas air mata, melakukan pembunuhan di luar hukum terhadap ratusan orang dan melukai banyak lainnya. Mereka juga menasar pembela HAM, jurnalis, dan lawan politik dengan intimidasi dan hukuman sewenang-wenang. Sebagian ditargetkan karena telah mengungkap korupsi atau pelanggaran HAM. Sebagian menjadi target terkait pemilihan umum yang diduga memiliki bukti kecurangan yang kredibel atau pembatasan kebebasan dasar. Perempuan pembela HAM sering mengalami berbagai risiko tambahan karena gender mereka.

Di beberapa negara, khususnya di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara, pihak berwenang menghukum dan bahkan memenjarakan pembela HAM dan jurnalis menggunakan tuduhan yang tidak jelas seperti menyebarkan informasi keliru, mengungkap rahasia negara, dan menghina pihak berwenang, atau melabeli mereka sebagai “teroris”. Pemerintah di beberapa negara menggunakan alat pemantauan berbasis digital untuk menasar mereka. Sebagian upaya pemerintah tersebut melumpuhkan operasi organisasi HAM, termasuk Amnesty International. Di Amerika Latin dan Karibia, yang masih menjadi kawasan paling rawan bagi pembela HAM, banyak terjadi pembunuhan oleh kelompok kriminal yang terkait dengan kepentingan negara atau bisnis.

Beberapa pihak berwenang di Amerika, Timur Tengah, dan Afrika Utara mengeluarkan undang-undang yang mengkriminalisasi komentar terkait pandemi dan selanjutnya menghukum orang-orang yang menyebarkan berita bohong atau mengganggu keputusan pemerintah. Beberapa pihak berwenang di Eropa mengaitkan krisis kesehatan publik dengan masalah keamanan nasional, menyiapkan undang-undang keamanan nasional secara tergesa-gesa atau meningkatkan, atau mengancam meningkatkan, kemampuan pengawasan.

Untuk menerapkan pembatasan kerumunan selama pandemi, pemerintah di banyak negara melarang total demonstrasi atau menggunakan kekuatan yang melanggar hukum, terutama di Afrika dan Amerika. Terlebih lagi, pihak berwenang menghukum orang-orang yang mengkritik tindakan pemerintah terkait COVID-19, mengungkap berbagai pelanggaran yang dilakukan pemerintah dalam merespon pandemi, atau mempertanyakan narasi resmi dari pemerintah setempat seputar masalah COVID-19, terutama di Asia, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Ratusan orang ditahan secara sewenang-wenang dan, di beberapa kasus, didakwa dan dituntut. Di beberapa negara, pemerintahnya

memanfaatkan pandemi sebagai dalih untuk melarang kritik yang tidak berkaitan.

Di tingkat internasional, terdapat kemajuan di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengatasi krisis HAM seperti yang terjadi di Libya, Venezuela, dan Yaman, dengan membuat, mempertahankan, serta meningkatkan mekanisme investigasi yang dapat memberi kontribusi pada penuntutan kriminal. Namun, negara-negara anggota PBB gagal memberikan respons kredibel terhadap represi perbedaan pendapat dan pola-pola situasi HAM serius lainnya di berbagai negara termasuk Tiongkok, Mesir, dan India. Pemerintah di beberapa negara memperparah masalah tersebut dengan terus menjual peralatan pengendali massa dan amunisi kepada negara-negara yang paling mungkin menggunakannya untuk melakukan pelanggaran hukum internasional dalam situasi penegakan hukum serta konflik. Beberapa bahkan melanggar embargo senjata Dewan Keamanan PBB secara terang-terangan.

Investigasi Mahkamah Pidana Internasional dilakukan terhadap kasus di Afghanistan dan dilanjutkan pada kasus di Myanmar/Bangladesh. Penyelidikan awal terkait kasus di Nigeria dan Ukraina telah diselesaikan, dan jaksa penuntut telah menyatakan maksud untuk melakukan investigasi dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa penuntut juga berupaya mendapatkan putusan atas cakupan wilayah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di Teritori Palestina yang diduduki, dengan maksud membuka investigasi.

Namun, negara-negara kuat terus mereduksi upaya-upaya mewujudkan akuntabilitas dan menaifkan respon kolektif atas pola-pola

pelanggaran HAM serius lainnya. AS memberikan sanksi kepada pegawai Mahkamah Pidana Internasional. Sikap Inggris yang menghalang-halangi menjadi faktor dominan dalam keputusan Kejaksaan untuk tidak melakukan investigasi atas tuduhan terkait tentara Inggris di Irak yang patut disesalkan. Tiongkok dan Rusia menyerang kerangka kerja HAM internasional dan pengawasan HAM independen oleh PBB. Kebuntuan politik yang terus terjadi di Dewan Keamanan PBB melumpuhkan respons terhadap krisis HAM secara tepat waktu dan efektif.

Selain itu, pemerintah di banyak negara menghambat hubungan tokoh masyarakat sipil dengan PBB melalui aksi-aksi pembalasan dan intimidasi. Mekanisme dan lembaga HAM PBB juga menghadapi krisis pendanaan dan likuiditas yang disebabkan oleh terlambatnya atau tidak dibayarnya iuran dari negara-negara anggota. Krisis ini diperparah dengan adanya pandemi.

Untuk memastikan bahwa lembaga yang diamanatkan melindungi hukum internasional dapat secara efektif mencegah, merespons dan mencari pertanggungjawaban atas represi terhadap perbedaan pendapat dan pola-pola kekerasan serius terhadap HAM lainnya di masa depan, semua negara harus memperkuat dan mendanai sepenuhnya mekanisme serta lembaga HAM PBB. Para pihak tersebut juga harus bekerja sama sepenuhnya dengan Mahkamah Pidana Internasional untuk kasus yang sedang berlangsung dan mengkritisi intervensi politik di dalamnya.

RINGKASAN KAWASAN ASIA – PASIFIK

Datangnya pandemi COVID-19 memperburuk situasi HAM di kawasan Asia-Pasifik. Kawasan ini adalah kawasan pertama yang terdampak oleh pandemi COVID-19 sejak kasus pertama dilaporkan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Peneguran yang dilakukan pihak berwenang di Tiongkok terhadap tenaga kesehatan yang memberikan peringatan tentang adanya virus baru memicu tuntutan untuk transparansi dari publik, bukan hanya di Tiongkok, tapi juga di negara-negara lainnya di kawasan ini. Ini adalah yang pertama dari beberapa kejadian serupa yang terjadi sepanjang tahun saat pemerintah memanfaatkan pandemi sebagai dalih untuk membungkam suara-suara kritis dan membatasi hak kebebasan berekspresi secara berlebihan, termasuk hak untuk menerima dan memberi informasi tentang COVID-19.

Banyak pemerintah di kawasan ini yang memberlakukan undang-undang dan langkah-langkah untuk menghukum pelaku penyebaran “informasi keliru” atau “informasi palsu” tentang COVID-19. Di negara-negara yang memiliki sejarah penyalahgunaan kepemimpinan, undang-undang ini digunakan untuk meningkatkan penindasan yang sudah ada, terutama pada kebebasan berekspresi, berserikat, dan unjuk rasa damai. Debat terbuka dan kritik terhadap respons pemerintah terkait pandemi sangat dibatasi. Banyak pembela HAM, jurnalis, pengacara, dan anggota lawan politik yang diserang oleh pemerintah di kawasan ini. Serangan tersebut termasuk pelecehan, intimidasi, ancaman, kekerasan, dan penangkapan secara sewenang-wenang karena mereka menyuarakan perbedaan pendapat yang sah serta mengkritik tindakan pemerintah.

Guna mencegah penyebaran COVID-19, berbagai tingkatan karantina wilayah dan

pembatasan mobilitas lainnya diterapkan oleh pemerintah. Kerumunan publik sering kali tidak diizinkan, dan karenanya aksi protes yang menuntut reformasi politik sangat dibatasi. Namun, seiring berjalannya tahun, orang-orang di India, Thailand, dan Hong Kong turun ke jalan untuk menentang penindasan pemerintah. Polisi mengerahkan kekuatan yang berlebihan dan tidak diperlukan untuk membubarkan kerumunan publik ini.

Banyak pemerintah yang juga merespons pandemi COVID-19 ini lebih lanjut dengan mengesahkan atau menggunakan undang-undang keamanan nasional represif atau antiterorisme yang represif sebagai senjata. Undang-undang seperti ini memperkuat kekuasaan yang telah dimiliki beberapa pemerintah di kawasan ini. Di India, peserta unjuk rasa damai akan dihukum pembatasan komunikasi dan kebebasan utama di Jammu dan Kashmir terus berlanjut; jurnalis dan pembela HAM diinterogasi karena dituduh melakukan kegiatan “antinasional”.

Meski tingkat kematian di kawasan Asia-Pasifik lebih rendah dibandingkan tempat-tempat lain di dunia, pandemi menghancurkan ekonomi dan memperlebar kesenjangan sosial yang sudah ada di sana. Pandemi berdampak secara disproportional terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti pekerja migran, pengungsi, orang-orang miskin, kelompok etnis dan agama minoritas, serta para tahanan.

Kebijakan yang dibuat dan diterapkan oleh banyak negara guna mengatasi penyebaran COVID-19 merefleksikan norma-norma patriarki yang mendiskriminasi perempuan. Karantina wilayah juga berkontribusi dalam peningkatan tajam kasus kekerasan seksual dan gender terhadap wanita dan anak perempuan, dan pemerintah di kawasan ini tidak memberikan informasi yang memadai untuk mengatasi masalah ini.

Kelompok etnis dan agama minoritas di wilayah ini diserang. Pemerintah Tiongkok masih

melakukan represi sistematis terhadap suku Uighur dan Muslim beretnis Turki lainnya di wilayah Xinjiang. Muslim di India diserang dan dikambing hitamkan selama pandemi dan tidak diperkenankan memiliki akses pengobatan. Militer Myanmar terus mengelak akan kejahatan mereka terhadap Rohingya. Di Afghanistan dan Pakistan, beberapa anggota kelompok minoritas dibunuh oleh kelompok bersenjata.

Kawasan Asia-Pasifik mengalami banyak bencana alam karena perubahan iklim. Negara-negara di kawasan ini yang bertanggung jawab atas tingginya emisi gas rumah kaca global gagal memenuhi target pengurangan yang cukup yang dapat membantu menghindari dampak HAM terburuk dari perubahan iklim.

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Dalam hitungan hari sejak berita wabah COVID-19 muncul, pihak berwenang di beberapa negara di kawasan ini berupaya menekan informasi tentang hal ini dan menghukum siapa saja yang mengkritik tindakan pemerintah. Pihak berwenang Tiongkok berupaya mengendalikan informasi tentang COVID-19, baik secara daring maupun luring. Ratusan kata kunci terkait virus tersebut diblokir dan protes daring yang menuntut hak untuk menerima dan memberikan informasi mengenai COVID-19 dihapus. Dokter Li Wenliang, satu dari delapan orang yang berupaya menyebarkan informasi tentang virus baru sebelum pemerintah mengungkapkan wabah ini, dibungkam oleh polisi setelah dia mengirimkan pesan ke koleganya untuk memakai APD guna menghindari penularan. Pada akhirnya, dia meninggal dunia karena COVID-19.

Beberapa negara lainnya di kawasan ini menerapkan pembatasan serupa terkait apa yang boleh atau tidak boleh dikatakan mengenai COVID-19, sering kali dengan dalih untuk menekan penyebaran informasi palsu atau bohong. Pada bulan April, pihak berwenang di Indonesia memerintahkan polisi untuk aktif di

internet dan menindak “penyebarkan hoaks” serta orang-orang yang menghina pemerintah. Setidaknya 57 orang ditangkap. Jurnalis, akademikus, pelajar, dan aktivis menjadi korban intimidasi secara daring, termasuk ancaman kekerasan fisik melalui pesan teks. Di India dan Nepal, pihak berwenang menangkap atau mendakwa puluhan orang, banyak di antaranya jurnalis, karena dituduh menyebarkan “informasi keliru” atau “berita bohong” terkait pandemi.

Banyak orang, termasuk jurnalis, yang mengkritik respons pemerintah terhadap pandemi COVID-19 dihukum menurut undang-undang yang represif. Di Sri Lanka, polisi mengumumkan bahwa tindakan hukum akan diambil untuk orang-orang yang mempublikasikan postingan di media sosial yang kritis terhadap respons COVID-19 pemerintah. Beberapa komentator di media sosial ditangkap setelah adanya pengumuman tersebut. Di Bangladesh, hampir 1.000 orang didakwa dengan Undang-Undang Keamanan Digital negara tersebut, sementara 353 orang lainnya ditahan. Di antara target pertama adalah jurnalis Mohiuddin Sarker dan Toufiq Imroz Khalidi, keduanya merupakan editor portal daring. Pihak berwenang menangkap mereka pada bulan April

karena melaporkan tuduhan korupsi penggunaan dana yang ditujukan untuk bantuan COVID-19. Di Pakistan, Undang-Undang Kejahatan Elektronik berulang kali digunakan untuk mendakwa atau menangkap jurnalis atas komentar kritis mereka di internet, yang sering kali disertai dengan serangan daring yang kejam dan terkoordinasi.

Jurnalis terus menjadi korban tindakan balas dendam karena melaporkan berita yang tidak disukai pemerintah. Di Myanmar, setelah kelompok oposisi bersenjata etnik minoritas, Tentara Arakan, dinyatakan sebagai “organisasi teroris”, setidaknya tiga jurnalis dihukum dengan undang-undang terorisme dan Undang-Undang Asosiasi yang Dilarang setelah menghubungi kelompok tersebut. Di Jammu dan Kashmir,

polisi India menyerang atau memanggil 18 jurnalis karena laporan mereka dan kantor *Kashmir Times* disegel setelah editornya menuntut pemerintah karena dimatikannya layanan internet dan telepon di wilayah tersebut. Di Nepal, pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang baru yang mengancam hak kebebasan berekspresi, baik secara daring maupun luring. Di Singapura, bahkan saat undang-undang itu masih dalam proses gugat di persidangan, pihak berwenang menggunakan Undang-Undang Perlindungan dari Kepalsuan dan Manipulasi Daring sepanjang tahun untuk membungkam kritik pemerintah dan media independen. Di Filipina, jurnalis Maria Ressa dan Reynaldo Santos didakwa dengan “fitnah siber” dan pembuat undang-undang menolak memperpanjang waralaba ABS-CBN, salah satu media penyiaran independen terbesar di negara itu.

Hak kebebasan berekspresi, yang termasuk hak untuk menerima dan memberikan informasi, sangat penting selama terjadinya krisis kesehatan publik. Pemerintah harus memahami penuh bahwa akses ke informasi pandemi COVID-19 yang kredibel, objektif, dan berbasis bukti dapat menyelamatkan nyawa. Peran jurnalis dan media dalam menyediakan informasi tepercaya kepada publik selama krisis kesehatan ini sangatlah penting. Mereka juga berperan penting dalam menarik perhatian ke isu-isu yang menyangkut kepentingan publik dan menegakkan HAM. Daripada menjatuhkan upaya tersebut, pemerintah hendaknya memanfaatkan, mempromosikan, serta melindungi media yang kuat dan independen di kawasan ini.

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Pembela HAM, termasuk jurnalis, pengacara dan anggota oposisi politik terus diserang, dilecehkan, diintimidasi, diancam dan dibunuh karena dukungan sah mereka untuk HAM, pernyataan perbedaan pendapat dan kritik terhadap tindakan pemerintah dan korupsi.

Di Tiongkok, pembela HAM dan aktivis menjadi sasaran pelecehan, intimidasi, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya, serta penahanan sewenang-wenang dan penahanan tanpa komunikasi ke dunia luar (*incommunicado detention*). Mereka juga sering dituduh melakukan pelanggaran dengan alasan yang tidak jelas seperti “membocorkan rahasia negara”. Persidangan mereka secara rutin diadakan secara rahasia dan hak mereka untuk mendapat akses penasihat hukum dicabut. Banyak pengacara dari para pembela HAM ini tidak diberi hak atas kebebasan bergerak dan tidak dapat bertemu dengan klien mereka dan mengakses materi kasus.

Selama tahun ini, banyak pemerintah di kawasan ini berusaha melemahkan operasi LSM HAM untuk mencegah pembela HAM terus mengungkap pelanggaran HAM. Pemerintah Kamboja menggunakan UU yang represif terhadap Asosiasi dan LSM (LANGO) untuk mengecap mereka sebagai kelompok ilegal pembela HAM yang mengungkap praktik yang menyebabkan degradasi lingkungan. Pada bulan September, Amnesty International India terpaksa menghentikan kegiatan setelah pihak berwenang India membekukan rekening bank organisasi tersebut. Selama tahun ini, organisasi tersebut menerbitkan laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi selama dan setelah kerusuhan di Delhi pada bulan Februari di mana 53 orang, sebagian besar Muslim, tewas dan lebih dari 500 lainnya terluka. Kerusuhan tersebut menyusul pidato-pidato bersifat menghasut yang digaungkan oleh pejabat pemerintah dan anggota parlemen, tetapi belum diselidiki secara efektif beberapa bulan kemudian, termasuk dokumentasi keterlibatan dan partisipasi polisi Delhi dalam kerusuhan. Amnesty International India juga merilis laporan tentang Jammu dan Kashmir, mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi di sana setelah status khusus daerah itu dicabut pada Agustus 2019.

Di Malaysia dan Afghanistan, pembela HAM yang menarik perhatian terhadap praktik korupsi

di kalangan pemerintah menghadapi tantangan serius sepanjang tahun. Cynthia Gabriel dari Pusat Pemberantasan Korupsi dan Kronisme, bersama dengan pembela HAM lainnya Thomas Fann dan Sevan Doraisamy, diselidiki oleh pihak berwenang Malaysia karena mengangkat skandal korupsi yang melibatkan pejabat publik.

Pemerintah menggunakan tindakan kontra-terorisme kepada pembela HAM atau melabeli mereka sebagai “teroris” di negara-negara termasuk Filipina dan India. Pihak berwenang Filipina melanjutkan praktik “mencap merah” para pembela HAM dan aktivis sebagai “teroris” atau simpatisan kelompok komunis bersenjata. Pada bulan Agustus, Randall Echanis dan Zara Alvarez terbunuh dalam waktu seminggu di kota yang berbeda. Mereka berdua telah “dicap” sebagai “teroris” oleh pemerintah karena kegiatan aktivis dan pembelaan HAM. Selama tahun tersebut, Badan Investigasi Nasional (NIA) India, badan anti-terorisme utama negara itu, menangkap beberapa pembela HAM dan menggerebek rumah serta kantor mereka. Di antara mereka yang ditangkap adalah tujuh pembela HAM yang bekerja dengan kelompok-kelompok marjinal dan sembilan siswa yang memprotes secara damai Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) yang diskriminatif. NIA juga menggerebek kantor dan rumah pembela Kashmir, Khurram Parvez, dan tiga rekannya.

Ketika konflik di Afghanistan memasuki tahun kedua puluh, para pembela HAM juga dilukai dan dibunuh oleh orang bersenjata tak dikenal yang diduga anggota kelompok bersenjata, termasuk dua anggota staf Komisi HAM Independen Afghanistan, yang tewas dalam serangan terhadap mobil mereka di Kabul. Pada bulan Desember, Presiden Ghani membentuk komisi bersama untuk perlindungan pembela HAM. Ini dipandang oleh organisasi HAM sebagai awal mula kemajuan yang signifikan. Namun, tampaknya ini adalah satu-satunya perkembangan di wilayah tersebut yang

menjanjikan untuk mengatasi pola sistematis pelanggaran HAM.

Di Sri Lanka, pemerintah baru terus mengambil tindakan keras terhadap para pembela HAM, termasuk aktivis, jurnalis, penegak hukum, dan pengacara.

Pemerintah harus secara efektif menangani tindakan kekerasan terhadap pembela HAM dan pelaku tindakan ini harus dimintai pertanggungjawaban. Sangat penting bagi pembela HAM untuk dapat melakukan pekerjaan mereka dengan terbebas dari rasa takut akan hukuman, pembalasan atau intimidasi sehingga setiap orang dapat menikmati semua HAM secara efektif.

HAK ATAS KESEHATAN

Pandemi COVID-19 menunjukkan dan memperburuk kesenjangan akses yang setara terhadap fasilitas kesehatan dan kesenjangan sosial di kawasan ini. Di Korea Utara, kurangnya pasokan medis mendorong kelas menengah untuk mengamankan obat-obatan atau layanan kesehatan di pasar yang disebut sebagai “pasar abu-abu”. Di Papua Nugini, tingkat kemiskinan yang tinggi dan penyakit kronis lainnya memperburuk situasi mereka yang terinfeksi COVID-19.

Kampanye anti-narkoba yang menekankan kriminalisasi dan praktik penahanan sewenang-wenang tanpa tuntutan terhadap para pengguna narkoba berlanjut di Kamboja dan Filipina. Hal ini menyebabkan penjara-penjara semakin penuh dan sesak yang juga terus mengakibatkan terlanggarnya hak-hak kesehatan para tahanan. Di Filipina, Mahkamah Agung memerintahkan pembebasan atas lebih dari 80.000 narapidana untuk mencegah penyebaran COVID-19 di penjara. Di Kamboja, pihak berwenang mengungkapkan rencana untuk mengurangi kepadatan di penjara, tetapi implementasinya terbatas.

Di Malaysia, pihak berwenang melakukan razia imigrasi di daerah dengan populasi pekerja migran yang tinggi dan menangkap serta menahan banyak migran dan pengunjung. Wabah COVID-19 melanda pusat penahanan imigrasi, dan lebih dari 600 orang telah terinfeksi virus tersebut.

Pemerintah harus memastikan tersedianya akses ke fasilitas dan layanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi.

DISKRIMINASI – SERANGAN TERHADAP ETNIS DAN AGAMA MINORITAS

Di seluruh kawasan, etnis dan agama minoritas terus mengalami diskriminasi, kekerasan, dan bentuk persekusi lainnya oleh pihak berwenang.

Pada bulan Januari, Mahkamah Internasional memerintahkan pemerintah Myanmar untuk mencegah tindakan genosida terhadap etnis Rohingya. Pihak berwenang di Myanmar gagal memastikan pertanggungjawaban atas operasi militer di Negara Bagian Rakhine selama tahun 2017, yang menyebabkan lebih dari 700.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Dalam konteks operasi kontra-pemberontakan, pasukan keamanan terus melakukan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum humaniter internasional terhadap kelompok etnis minoritas lainnya di Negara Bagian Rakhine, Chin, Kachin dan Shan.

Di Tiongkok, pihak berwenang meluruskan diskriminasi dan persekusi yang mereka lakukan terhadap orang Tibet dan Uighur serta masyarakat Muslim Turki lainnya di kawasan Xinjiang dengan alasan melawan “separatisme”, “ekstremisme”, dan “terorisme”. Pihak berwenang di Tiongkok terus melakukan penahanan sewenang-wenang tanpa pengadilan, indoktrinasi politik, dan pemaksaan asimilasi budaya kepada orang Uighur dan Muslim Turki lainnya. Mereka memperketat pembatasan akses ke Xinjiang dan terus mendirikan kamp interniran massal sepanjang tahun.

Iminjan Seydin, yang menghilang selama tiga tahun, muncul pada bulan Mei dan memuji pihak berwenang Tiongkok dalam sebuah kesaksian yang tampaknya dipaksakan. Mahira Yacub, seorang perempuan Uighur yang bekerja di sebuah perusahaan asuransi, didakwa dengan “memberikan dukungan material untuk kegiatan terorisme” karena mengirimkan uang kepada orang tuanya di Australia untuk membantu mereka membeli rumah. Nagyz Muhammed, seorang penulis Kazakhstan yang telah ditahan sejak Maret 2018, dihukum secara rahasia dengan tuduhan “separatisme” karena makan malam bersama teman-temannya pada Hari Kemerdekaan Kazakhstan hampir satu dekade lalu.

Suku Uighur juga menghadapi tekanan di luar Tiongkok. Kedutaan dan agen Tiongkok terus mengganggu dan mengintimidasi orang-orang yang telah meninggalkan negara itu dan pergi ke pengasingan. Agen keamanan Tiongkok mengganggu warga Uighur di luar negeri melalui aplikasi perpesanan, meminta nomor ID mereka, lokasi tempat tinggal, dan informasi lainnya. Beberapa menerima panggilan telepon dari polisi keamanan Tiongkok, meminta mereka untuk memata-matai komunitas diaspora Uighur.

Di Mongolia Dalam, ada sebuah protes yang muncul terhadap kebijakan baru untuk bahasa di sekolah, kebijakan tersebut akan mengubah bahasa yang digunakan saat belajar-mengajar untuk beberapa kelas, yaitu dari bahasa Mongolia ke bahasa Mandarin. Ratusan orang yang memprotes – pelajar, orang tua, guru, perempuan hamil, anak-anak – dilaporkan ditangkap karena “membuat keributan dan memicu masalah”. Hu Baolong, seorang pengacara HAM yang berbicara selama protes, dilaporkan ditangkap dengan tuduhan “membocorkan rahasia negara di luar negeri”. Di beberapa negara, kelompok etnis dan agama minoritas adalah yang paling terdampak pandemi COVID-19. Muslim India adalah satu dari mereka yang semakin terpinggirkan. Setelah kelompok Muslim, Jemaat Tabligh, dituduh

menyebarkan virus di pertemuan publik, banyak umat Muslim yang tidak diberi akses ke layanan medis dan komoditas penting. Di media sosial, ada seruan untuk memboikot bisnis umat Muslim. Di Sri Lanka, pihak berwenang mencegah umat Muslim memakamkan orang-orang yang meninggal akibat COVID-19 dengan tata cara agama mereka dan sebagai gantinya mengkremasi jenazah secara paksa. Pemerintah Sri Lanka dilaporkan memiliki pandangan rasial terhadap komunitas Muslim di negara itu dengan mengidentifikasi mereka sebagai sumber risiko yang lebih tinggi selama pandemi.

Di Afghanistan, sedikitnya 25 orang tewas ketika kelompok bersenjata yang menamakan dirinya “Negara Islam” menyerang salah satu dari beberapa kuil Sikh di negara tersebut. Sebagian besar komunitas Syiah Hazara di negara tersebut juga mengalami banyak serangan dari kelompok bersenjata, termasuk pemboman pada bulan Oktober di Kabul, di sebuah sekolah yang menewaskan 30 orang, yang kebanyakannya adalah anak-anak.

Di Pakistan, komunitas Ahmadiyah menjadi sasaran serangan, boikot sosial dan ekonomi, dan setidaknya menjadi target atas lima pembunuhan. Selama bulan suci Muharram, para pendakwah dengan kebencian menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap minoritas Syiah di negara itu karena hampir 40 kasus penistaan ditujukan kepada ulama Syiah. Pada bulan Juli, tunduk pada tekanan dari politisi, beberapa media dan ulama, pemerintah Pakistan menghentikan pembangunan sebuah kuil Hindu di ibu kota, Islamabad. Hal itu disebut sebagai sebuah pengabaian terhadap hak masyarakat atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah Pakistan gagal mengambil tindakan efektif melawan pemaksaan pindah agama terhadap perempuan dan anak perempuan dari komunitas Hindu dan Kristen.

Pemerintah harus memastikan bahwa hak asasi etnis dan agama minoritas juga dilindungi. Selain itu, mereka harus memfasilitasi akses yang sama terhadap layanan kesehatan untuk

semua kelompok minoritas dan mengambil langkah untuk mengakhiri diskriminasi sistemik terhadap mereka.

PEREMPUAN DAN ANAK PEREMPUAN

Pandemi COVID-19 menyoroiti dan memperparah ketidaksetaraan gender di kawasan Asia Pasifik. Respons pemerintah terhadap pandemi ini mencerminkan sifat patriarki dan stereotip gender yang merendahkan perempuan.

Dalam sektor informal, di mana biasanya perempuan digaji lebih rendah dibanding pria, ribuan perempuan kehilangan mata pencaharian mereka dan terpaksa memikul tanggung jawab lebih di rumah, seperti mengurus anak-anak yang bersekolah dari rumah atau merawat keluarga yang sakit. Pada tahun-tahun sebelumnya, perempuan di seluruh kawasan Asia Pasifik melakukan pekerjaan tidak berbayar di rumah empat kali lebih banyak dibanding dengan pria. Angka tersebut meningkat tajam selama pandemi.

Perempuan juga terlibat dalam sebagian besar pekerjaan penting selama pandemi, termasuk dokter, perawat, petugas kebersihan, dan lain-lain. Saat kekerasan terhadap tenaga kesehatan terjadi di Pakistan bulan Mei lalu, sekelompok tenaga kesehatan perempuan terpaksa berlindung dengan mengurung diri di sebuah ruangan karena keluarga pasien yang merasa tak puas merusak rumah sakit tempat mereka bekerja.

Pekerja Gulf yang merupakan migran domestik yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Pasifik kehilangan pekerjaan dan terpaksa dipulangkan saat pandemi merebak. Di sebagian besar paket stimulus keuangan negara di kawasan, tidak ada ketentuan khusus untuk kebutuhan para perempuan, termasuk perlindungan sosial.

Banyak pemerintah di kawasan ini tidak mengklasifikasikan pelayanan untuk perempuan sebagai layanan penting dan itu bisa berlanjut

selama pengaman ketat guna mencegah penyebaran virus (*lockdown*), termasuk layanan yang ditujukan untuk mendukung dan mendampingi perempuan yang mengalami kekerasan seksual atau berbasis gender. Perempuan dan anak perempuan yang tinggal bersama pasangan atau keluarga yang kasar berada dalam bahaya. Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan pasangan intim meningkat tajam di negara-negara kawasan ini. Di Jepang contohnya, terdapat 13.000 kasus selama bulan April – 29% lebih tinggi dibanding bulan April tahun 2019.

Perempuan terus menjadi sasaran serangan misogini yang kejam. Di Indonesia, media berita feminis juga menjadi target serangan digital. Akun milik salah satu jurnalis diretas, dan dirinya juga dilecehkan penyerang yang mengirimkan gambar yang mengandung unsur pornografi dan pernyataan yang merendahkan perempuan.

Di Korea Selatan, merebaknya kekerasan daring terhadap perempuan semakin terlihat dengan penangkapan para pelaku kejahatan seks digital yang telah memeras lebih dari 70 perempuan dan anak perempuan untuk membagikan video dan foto yang eksploitatif secara seksual yang kemudian disebar oleh pelaku melalui aplikasi perpesanan.

Di Kamboja, Perdana Menteri Hun Sen memimpin serangan publik terhadap kebebasan berpendapat bagi perempuan dengan alasan “tradisi” dan “budaya” untuk membenarkan kebijakan atas tubuh dan pilihan perempuan. Pada bulan Januari, Hun Sen memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan terhadap perempuan yang mengiklankan produk di Facebook yang dianggap mengenakan pakaian terbuka. Dalam beberapa hari, vendor Facebook berhasil ditangkap dan didakwa memproduksi “pornografi” atas pakaian yang dikenakannya. Penyerangan terhadap hak-hak perempuan di Kamboja meningkat pada bulan Juni, saat pemerintah berusaha mengubah hukuman ini menjadi undang-undang, mengkriminalisasi penggunaan pakaian yang dianggap “terlalu

pendek” atau “terlalu terbuka”. Rancangan undang-undang tersebut memicu protes daring dari banyak perempuan dan anak perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan dan impunitas terhadap kejahatan ini terus terjadi di sejumlah negara. Di Papua Nugini, tuduhan sihir membuat perempuan semakin rawan terhadap kekerasan. Di Afganistan, perempuan terus mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, terutama di daerah yang dikuasai oleh Taliban, di mana hukuman yang kejam dijatuhkan karena dianggap tidak sesuai dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Lebih dari 100 kasus pembunuhan yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan dilaporkan di Afganistan sepanjang tahun ini, dan ini menunjukkan kegagalan pemerintah yang terus terulang dalam menyelidiki pembunuhan dan kekerasan terhadap perempuan secara efektif. Di Fiji, seorang mantan kapten rugby dihukum atas kasus pemerkosaan dan dipenjara selama 8 tahun diizinkan untuk melanjutkan pelatihan setelah menjalani hukuman kurang dari setahun.

Di Pakistan, pawai tahunan peringatan Hari Perempuan Nasional diwarnai penyerangan. Pertama, dari pengadilan sebagai upaya untuk melarang pawai, kemudian saat hari perayaan, kelompok keagamaan meyerang demonstran dengan menggunakan batu di Islamabad. Para polisi gagal melindungi para pengunjung pawai. Pada bulan September, pemerkosaan berkelompok terhadap seorang perempuan di jalan raya memicu kemarahan nasional disertai seruan pengunduran diri untuk petinggi polisi dan hukuman yang berat untuk tersangka. Pada bulan Desember, pemerintah mengeluarkan peraturan yang berupaya untuk mempercepat persidangan dan menghukum pelaku dengan kebiri kimia paksa. Amnesty International mengungkapkan bahwa kebiri kimia secara paksa melanggar kewajiban internasional dan konstitusional Pakistan tentang larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Di India dan Nepal, pemerkosaan terhadap perempuan Dalit memicu kemarahan. Pada bulan Mei, seorang gadis Dalit berusia 12 tahun dipaksa menikahi pria yang diduga memerkosanya, seorang pria yang berasal dari kasta dominan di distrik Rupandehi, Nepal. Pada bulan September, gadis Dalit berusia 12 tahun lainnya diperkosa dan dibunuh di distrik Bajhang, yang diduga dilakukan oleh seorang pria yang pernah menghindari tuntutan atas kasus pemerkosaan lain terhadap gadis berusia 14 tahun pada bulan sebelumnya. Juga pada bulan September, seorang perempuan Dalit diperkosa dan dibunuh oleh sekelompok pria dari kasta dominan di Hathras, negara bagian Uttar Pradesh di India. Jenazahnya dikremasi oleh polisi tanpa persetujuan keluarga. Mereka akhirnya juga baru ditangkap setelah adanya protes tuntutan keadilan dan pertanggungjawaban dari seluruh negeri.

Untuk mengatasi berbagai masalah kekerasan terhadap perempuan, pemerintah Korea Selatan membuat undang-undang untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak perempuan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Majelis Nasional meningkatkan hukuman bagi kejahatan seksual digital. Usia persetujuan juga dinaikkan dari 13 tahun menjadi 16 tahun, tanpa pengecualian, dan undang-undang pembatasan juga dihilangkan untuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Dalam mengembangkan respons dan pemulihan pascapandemi, pemerintah harus mengutamakan peningkatan kesetaraan gender dan menghapuskan kekerasan berbasis gender serta stereotip gender yang membahayakan. Perempuan juga harus terlibat di setiap tahapan legislatif, kebijakan, dan proses pengambilan keputusan anggaran dalam rencana pengembangan respons dan pemulihan pascapandemi oleh para pemerintah.

KEGAGALAN DALAM MENCEGAH PERUBAHAN IKLIM

Kawasan Asia Pasifik paling rentan terhadap efek krisis iklim. Pada tahun 2020, serangkaian kejutan iklim memengaruhi HAM di Asia Pasifik. India diterjang oleh topan dahsyat Amphan, sementara Bangladesh, Nepal, dan Myanmar mengalami banjir yang menyebabkan jutaan warga mengungsi. Australia mengalami kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang mengharuskan warga mengungsi dan menyebabkan polusi udara.

Di samping dampaknya yang parah, negara-negara di kawasan Asia Pasifik paling bertanggung jawab atas emisi global gagal menetapkan target pengurangan yang memadai yang dapat menghindari dampak buruk terhadap HAM dari perubahan iklim. Australia yang telah menjadi pengeksportor bahan bakar fosil terbesar di dunia, gagal menetapkan target pengurangan emisi yang lebih ambisius pada tahun 2030 atau berkomitmen mencapai emisi nol dalam jangka panjang.

Sementara Jepang dan Korea Selatan mengumumkan target netralitas karbon pada 2050— dan Tiongkok pada 2060—mereka gagal membuktikan bahwa mereka sudah mengambil langkah untuk mencapai emisi bebas karbon sebelum tanggal tersebut karena mereka tidak boleh menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap HAM di dalam dan di luar negara.

Pemerintah harus segera mengadopsi dan mengimplementasikan target serta strategi untuk mengurangi emisi guna melindungi HAM dari krisis iklim dan memastikan transisi yang adil dan konsisten terhadap HAM menuju ekonomi bebas karbon dan masyarakat yang tangguh.

INDONESIA

Republik Indonesia

Kepala Negara dan Pemerintah:

Presiden Joko Widodo

Banyak tenaga medis yang belum memiliki akses terhadap alat pelindung diri (APD) atau tes Covid-19 yang memadai. Hak atas kebebasan berekspresi dibatasi dengan adanya arahan Kepolisian Republik Indonesia yang mengkriminalisasi kritikan terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi. Jumlah orang yang ditahan karena mengemukakan pendapat atau melakukan aksi protes secara damai terus meningkat. Terdapat intimidasi terhadap akademisi, mahasiswa, aktivis, pembela HAM, pemimpin keadilan sosial (*social justice leaders*), serta jurnalis secara digital dari pihak tidak dikenal guna membungkam suara kritis mereka. Meskipun beberapa jurnalis telah mengajukan pengaduan ke polisi pada bulan Agustus, namun proses penyelidikan masih belum jelas hingga akhir tahun. Setidaknya terdapat 35 orang tahanan hati nurani yang dipenjarakan. Pasukan keamanan melakukan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat, namun sebagian besar tidak dihukum. DPR mencabut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari daftar prolegnas prioritas pada pertengahan tahun. Komunitas LGBTI masih terancam karena pernyataan menyesatkan yang dibuat oleh beberapa pejabat publik atas dasar "moralitas".

LATAR BELAKANG

Indonesia telah mencatat 22.138 kematian akibat COVID-19 (82 orang per 100.000 populasi) pada akhir tahun, menjadikan Indonesia negara dengan tingkat kematian tertinggi ketiga di Asia. Pandemi dan respons pemerintah memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap HAM, terutama hak-hak yang

berkaitan dengan tenaga kesehatan, hak atas informasi, hak-hak pekerja, dan hak atas kebebasan berekspresi. Indonesia gagal mengutamakan perlindungan HAM dalam setiap tindakan pencegahan, persiapan, penahanan penularan, serta kebijakan dan aktivitas perawatan kesehatan.

HAK ATAS KESEHATAN

TENAGA KESEHATAN

Pada akhir tahun, setidaknya ada 504 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 ataupun kelelahan akibat jam kerja yang panjang. Pada bulan Maret, Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia berkata bahwa para tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 tidak memiliki alat pelindung diri (APD) yang memadai. Lambatnya distribusi APD, terutama di daerah terpencil, tidak mampu mengimbangi kasus COVID-19 yang terus bertambah. Seorang dokter dari Flores melaporkan pada bulan April bahwa mereka harus mencuci dan memakai ulang masker sekali pakai dikarenakan kehabisan stok.¹

Para tenaga kesehatan dan keluarganya kesulitan mengakses tes usap (*swab test*) COVID-19.² serta mereka masih harus membayarnya sendiri. Mereka juga mengalami diskriminasi karena pekerjaannya. Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengatakan bahwa orang-orang takut para tenaga kesehatan ini akan menularkan virus. Setidaknya ada 19 orang tenaga kesehatan yang diusir dan tidak diizinkan memasuki tempat tinggal mereka pada 22 Maret hingga 16 April. Akibat tidak dapat menemukan alternatif tempat tinggal lain, mereka terpaksa tinggal di rumah sakit tempat mereka bekerja.

HAK ATAS INFORMASI

Pada bulan Maret, menyusul pernyataan pemerintah tentang dua kasus COVID-19 pertama di Indonesia, Menteri Kesehatan memutuskan untuk menutup data-data krusial

terkait rantai penularan COVID-19, seperti pelacakan kontak dan riwayat perjalanan pasien. Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan kepanikan serta berdampak pada ketertiban umum.

Beberapa pejabat mengakui bahwa laporan pemerintah tentang wabah ini sangat kurang. Pada bulan April, juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkata bahwa mereka tidak bisa memberikan data yang akurat karena statistik milik Kementerian Kesehatan tidak sesuai dengan laporan dari administrasi provinsi, dan data Kementerian Kesehatan juga tidak lengkap.

Pemerintah tidak transparan dalam menyampaikan data terkait jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 serta tempat mereka bekerja. Ikatan Dokter Indonesia mengkritik pemerintah dan meminta agar data pasien COVID-19 dapat diakses oleh otoritas medis yang berkaitan agar dapat memfasilitasi pelacakan kontak dan perawatan.

HAK-HAK PEKERJA

Pandemi COVID-19 berdampak buruk pada hak-hak para pekerja, meliputi: pemutusan hubungan kerja; ancaman pemotongan upah dan tunjangan hari raya oleh pengusaha di sektor-sektor yang terkena dampak pandemi; serta problematika kebijakan menjaga jarak dan bekerja dari rumah.

Presiden mengumumkan perlunya kebijakan menjaga jarak dan bekerja dari rumah pada 14 Maret, namun pengusaha di beberapa sektor yang tidak dikategorikan sebagai pekerja esensial tetap mewajibkan kehadiran para karyawannya. Dalam beberapa kasus, mereka mengancam akan memotong upah dan/atau cuti tahunan jika karyawan tidak masuk. Pekerja informal di bidang jasa pengiriman, pabrik garmen, dan restoran tetap bekerja selama pandemi. Pemerintah gagal meminta pertanggungjawaban para pengusaha di sektor ini yang tidak

menyediakan fasilitas cuci tangan serta masker, atau memberlakukan kebijakan jaga jarak.

Pada bulan Oktober, Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus law*) yang mengubah ketentuan terhadap hak-hak pekerja, termasuk termasuk menghilangkan ketentuan tentang batas waktu maksimum kontrak kerja sementara, mengubah formula upah minimum, dan menaikkan batasan lembur.³

KEBEBASAN BEREKSPRESI

Pihak berwenang menindak kritik publik atas respons pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Pada tanggal 4 April, Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram No. ST/1100/IV/HUK.7.1/2020, menginstruksikan polisi untuk memantau dunia maya dan mengambil tindakan untuk melawan “penyebarkan berita bohong” serta mereka yang menghina Presiden beserta jajarannya.

Pihak tidak dikenal telah melakukan intimidasi terhadap akademisi, mahasiswa, aktivis, serta jurnalis secara digital untuk menanamkan rasa takut dan membungkam suara kritis mereka. Intimidasi terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ancaman kekerasan fisik melalui pesan serta intervensi dari pimpinan universitas terhadap mahasiswa yang membicarakan isu-isu politik yang sensitif.

Serangan digital juga menargetkan kelompok media alternatif, termasuk grup berita feminis daring, Magdalene dan Konde. Informasi pribadi milik salah satu jurnalis Magdalene diretas, dia juga dilecehkan oleh orang tidak dikenal yang mengiriminya gambar pornografi dan pernyataan yang merendahkan perempuan.⁴ Beberapa serangan dan pelecehan tersebut telah dilaporkan ke polisi; namun proses penyelidikan masih tidak jelas hingga akhir tahun.

KEBEBASAN BERSERIKAT DAN BERSERIKAT

TAHANAN HATI NURANI

Pihak berwenang terus menuntut orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan politik yang dilakukan secara damai, terutama di wilayah yang memiliki sejarah gerakan pro-kemerdekaan seperti Papua dan Maluku dengan menggunakan pasal dalam KUHP dan pasal makar. Pada akhir tahun, setidaknya ada 48 orang tahanan hati nurani dari Papua dan 10 orang dari Maluku yang masih dipenjara. Mereka dituduh melakukan makar meski melakukan aksi protes damai dan tidak melakukan tindak pidana yang diakui secara internasional.

Pada tanggal 25 April, pihak berwenang menahan tujuh aktivis yang berasal dari gerakan Republik Maluku Selatan karena mengadakan upacara pengibaran bendera "*Benang Raja*" secara damai saat perayaan 70 tahun Republik Maluku Selatan. Tanggal 23 Maret, pasukan militer memerintahkan setiap rumah untuk mengibarkan bendera negara Indonesia.

Pada bulan September 2019, tujuh warga Papua yang ditangkap di Jayapura karena mengikuti protes anti-rasisme damai untuk mendukung mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, akhirnya dibebaskan dari penjara di Balikpapan, di mana mereka telah dipindahkan atas alasan keamanan. Pada tanggal 17 Juni, hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, menjatuhkan mereka hukuman 10 dan 11 bulan penjara atas keterlibatan mereka dalam protes anti-rasisme. Setelah menyelesaikan hukuman termasuk masa penahanan, mereka tidak mendapat bantuan keuangan untuk pulang karena Kejaksaan Agung mengklaim tidak ada uang untuk membiayai kepulangan mereka ke Papua.

PEMBELA HAK ASASI MANUSIA

Pembela HAM dan pemimpin keadilan sosial / *social justice leaders* (kebanyakan pemimpin kelompok yang menentang pengusiran paksa

dan masalah perebutan lahan lainnya) terus mendapat ancaman, serangan, intimidasi, dan penuntutan sewenang-wenang atas kegiatan mereka yang tidak melanggar hukum. Pihak berwenang sering menangkap pengkritik sebagai cara untuk membungkam mereka.

Antara bulan Februari 2019 dan 21 September 2020, Amnesty International mencatat setidaknya ada 201 ketua pembela HAM dan *social justice leaders* menjadi korban pelanggaran HAM, baik secara luring maupun daring. Mereka dilecehkan dan diintimidasi hanya karena mengkritik pemerintah atau membicarakan isu-isu politik sensitif seperti pelanggaran HAM dan kekerasan di Papua. Intimidasi daring terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pencurian kredensial akun WhatsApp, panggilan spam dari nomor internasional yang tidak dikenal, serta gangguan digital seperti gangguan selama diskusi daring, terutama soal isu-isu Papua.

Pada tanggal 5 Juni, webinar yang dilaksanakan oleh Amnesty International untuk mendiskusikan rasisme di Papua diganggu oleh panggilan spam dan intrusi. Robocall dari tiga nomor asing tidak dikenal membombardir tiga pembicara selama diskusi berlangsung.

Pada bulan Agustus, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, program beasiswa yang didanai oleh pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Keuangan Indonesia, meminta Veronica Koman, seorang pengacara HAM yang mendokumentasikan pelanggaran HAM di Papua, untuk mengembalikan uang beasiswa studi magisternya.⁵ Selama dua tahun sebelumnya dia mengalami kekerasan, intimidasi, serta ancaman, termasuk ancaman pembunuhan dan pemerkosaan, dan dia juga hidup dalam pengasingan (*exile*) di Australia.

Sengketa tanah yang melibatkan penduduk dan perusahaan lokal diwarnai dengan pelanggaran HAM. Pada bulan Agustus, polisi di Kalimantan tengah menangkap enam penduduk setempat, termasuk pemimpin keadilan sosial dari

komunitas Laman Kinipan, Effendi Buhing, karena mempertahankan hutan adat dari ekspansi PT Sawit Mandiri Lestari, sebuah perusahaan minyak sawit. Polisi menangkap mereka atas tuduhan pencurian, namun pengamat yakin bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan meningkatnya perlawanan mereka terhadap pengusuran paksa oleh perusahaan minyak sawit. Antara bulan Januari dan Agustus, setidaknya ada 29 pembela HAM dan pemimpin keadilan sosial yang ditahan, mengalami kekerasan fisik, dan diintimidasi. Masih belum ada pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap pembela HAM di masa lalu, termasuk kasus Fuad Muhammad Syariffudin (Udin), Wiji Thukul, Marsinah, serta aktivis HAM terkemuka Munir Said Thalib (Munir).

PELANGGARAN HAM DI PAPUA DAN PAPUA BARAT

Kelompok HAM melaporkan pembunuhan melanggar hukum dan pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh pasukan keamanan, terutama penggunaan kekuatan yang berlebihan. Antara bulan Februari 2018 dan Agustus 2020, tercatat ada 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan, dengan melibatkan 96 korban. Dalam 15 kasus, terduga pelaku merupakan anggota kepolisian; dalam 13 kasus, terduga pelaku merupakan anggota militer; dan dalam 12 kasus, kedua anggota kepolisian dan militer diduga terlibat.

Pada tanggal 19 September, Yeremia Zanambani, pemimpin gereja Kristen Evangelis Indonesia di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua, terbunuh. Anggota polisi dan militer mengatakan

bahwa kelompok bersenjata berada di balik kematiannya. Aktivis lokal Papua yang berhubungan dekat dengan keluarga pastor menolak pernyataan tersebut dan menduga militer menembak Yeremia selama pencarian anggota kelompok bersenjata yang dicurigai membunuh dua perwira.⁶ Selama operasi militer, banyak penduduk setempat yang mengungsi ke hutan terdekat atau mencari perlindungan di daerah sekitar.

Pemerintah saat ini membatasi akses pemantau HAM internasional ke Papua. Penyelidikan atas laporan pembunuhan di luar hukum oleh pasukan keamanan di Papua juga jarang diadakan.⁷

HAK-HAK PEREMPUAN

Data dari Komnas Perempuan pada bulan Juli menunjukkan adanya peningkatan laporan kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 75% saat masa pandemi.

Belum ada payung hukum yang mencakup segala jenis kekerasan seksual. KUHP Indonesia mendefinisikan kekerasan seksual hanya sebatas pemerkosaan dan “perzinahan” (bertentangan dengan hukum internasional), dan memberikan perlindungan terbatas bagi para penyintas. Namun pada 2 Juli, DPR mencabut RUU Pemberantasan Kekerasan Seksual dari daftar prioritas program legislasi nasional. Hal ini melemahkan penerapan kerangka hukum komprehensif yang mampu menjamin penuntutan pelaku dan menawarkan perlindungan yang sesuai bagi penyintas kekerasan seksual.

HAK PARA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER DAN INTERSEKS (LGBTI)

Kekerasan, intimidasi, penyerangan, serta diskriminasi terhadap LGBTI masih terjadi. Media melaporkan adanya pernyataan yang menghasut, tidak tepat, dan menyesatkan yang dibuat oleh pejabat publik dengan alasan membela moralitas negara. Baik aktor negara maupun non-negara bertanggung jawab atas tindak kekerasan serta ancaman, intimidasi dan jenis kekerasan lainnya terhadap individu LGBTI.

Pada tanggal 1 September, polisi di Jakarta menggerebek pertemuan sekelompok laki-laki di apartemen di Jakarta Selatan. Sembilan orang ditangkap dan didakwa karena “memfasilitasi tindakan asusila” berdasarkan undang-undang pornografi, diancam dengan hukuman hingga 15 tahun penjara.⁸

-
1. Indonesia: COVID-19 beserta dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia (ASA 21/2238/2020)
 2. Indonesia: Unprotected, Overworked, Ailing Indonesian Health Workers Face Avalanche of COVID-19 Cases (Siaran pers, 11 September)
 3. Indonesia: RUU Ciptaker Sah, Indonesia Berpotensi Alami Krisis HAM (Siaran pers, 5 Oktober)
 4. Indonesia: End Wave of Digital Attacks on Students, Journalists, Activists (ASA 21/2536/2020)
 5. Indonesia: Hukuman Finansial Veronica Koman Bentuk Intimidasi Pembela HAM (Siaran pers, 14 Agustus)
 6. Indonesia: Ungkap Penembak Pendeta Senior di Papua (Siaran pers, 23 September)
 7. Indonesia: Civil and Political Rights Violations in Papua and West Papua (ASA 21/2445/2020)
 8. Indonesia: Men Accused of Holding ‘Gay Party’ Face 15 Years in Jail (Siaran pers, 3 September)